

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS
KOTA SIBOLGA TAHUN 2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan pemerintahan yang baik (Good Governance), kebijakan umum pemerintah Daerah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan terfokus pada kemaslahatan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan out put dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang Outcome adalah berfungsinya sarana, barang, dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Menjadi Kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga.

Perencanaan strategis adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial daerah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan serta mengambil keputusan dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Sibolga Sambas dengan melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Walikota Sibolga untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja OPD, Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja OPD

Kecamatan Sibolga Sambas, hal ini karena perencanaan strategis OPD merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem Pemerintahan Daerah Kota Sibolga.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya serta mampu eksis dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka OPD harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan-perbaikan yang harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada komitmen pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan skala prioritas yang terinci pada setiap bidang pembangunan. Hal tersebut seiring dengan adanya tuntutan peningkatan pelayanan dari masyarakat dan diperkirakan akan terus meningkat. Setiap jenis pelayanan kepada masyarakat harus memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal tersebut sesuai dengan kondisi dan potensi Sumber Daya Manusia di Kota Sibolga serta diimplementasikan untuk meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya di wilayah OPD Kecamatan Sibolga Sambas.

Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran teknis atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2016–2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program kegiatan setiap bidang kewenangan dan fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Sibolga Sambas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan rencana strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Walikota Sibolga No 24 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kota Sibolga;
8. Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Sibolga tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2016–2021 dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap Penyelenggaraan pemerintahan, perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan Sibolga Sambas, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program OPD Kecamatan Sibolga Sambas, lintas OPD, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian Renstra OPD Kecamatan Sibolga Sambas menjadi landasan penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan Sibolga Sambas, yang bersumber dari Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra OPD Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2016–2021 adalah :

1. Pedoman resmi bagi OPD Kecamatan Sibolga Sambas, dalam menentukan prioritas program dan Kegiatan pembangunan tahunan yang didanai dari APBD Kota Sibolga;
2. Untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang sejalan dengan visi, misi, dan program Kepala OPD Kecamatan Sibolga Sambas yang sesuai dengan visi, misi, strategi, kebijakan dan program Walikota Sibolga;
3. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja OPD Kecamatan Sibolga Sambas;
4. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
5. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi;
6. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
7. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang

- dilakukan oleh Kecamatan Sibolga Sambas supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
8. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;
 9. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai;
 10. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
 11. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi;
 12. Memudahkan untuk mencapai tujuan OPD Kecamatan Sibolga Sambas;
 13. Memudahkan arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan di wilayah OPD Kecamatan Sibolga Sambas.

I.4 Sistematika Penulisan

Agar diperoleh pemanfaatan yang optimal dari Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sibolga Sambas, maka sistematika Penulisan Renstra diupayakan untuk mampu menjadi Pedoman dan mudah dipahami dalam kerangka pelaksanaan penyelenggara pemerintahan dan perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan.

Adapun sistematika penulisan Renstra sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

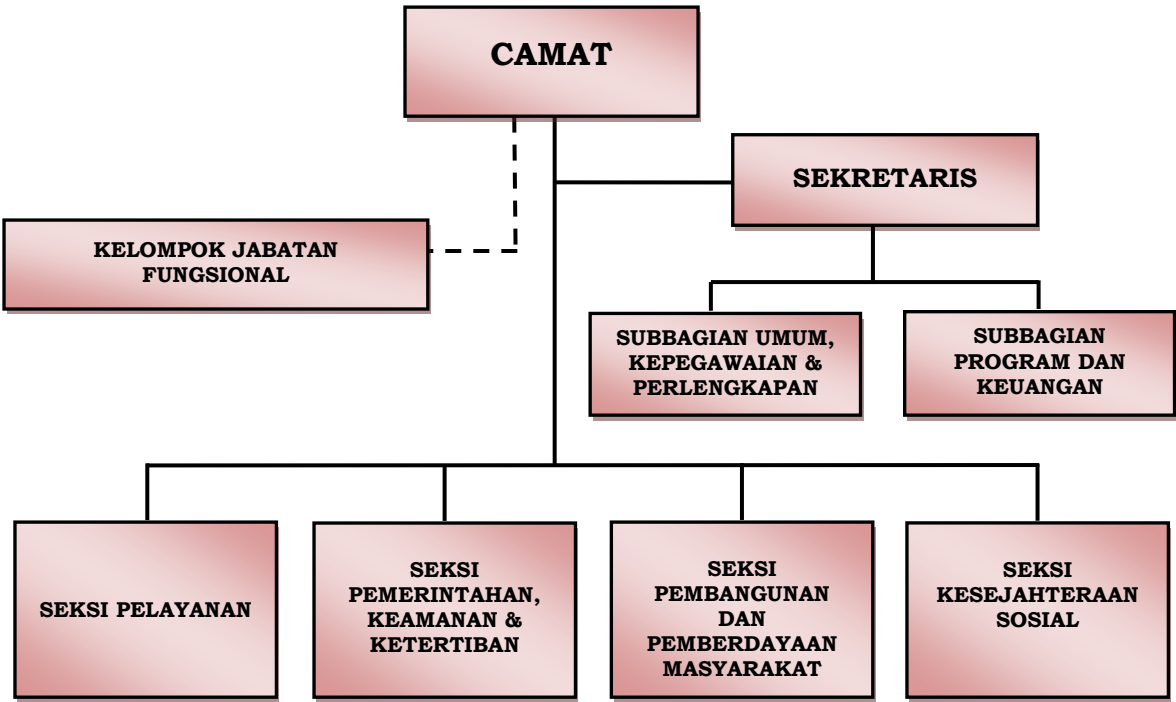
BAB. III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB. IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan
4.2	Sasaran
BAB. V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Pada Bab ini diuraikan Strategi dan Arah Kebijakan
BAB. VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Pada Bab ini diuraikan rencana program dan kegiatan dan Pendanaan
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Pada Bab ini dikemukakan Indikator kinerja OPD yang akan dicapai OPD Dalam lima tahun mendatang
BAB. VIII	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

➤ **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sibolga, dan untuk kelancaran Pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Sibolga, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Sibolga Sambas adalah sebagai berikut :



Gambar A.1
Bagan Struktur Organisasi
Kecamatan Kota Sibolga

➤ **Tugas dan Fungsi**

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dimana seorang Camat dibantu oleh :

1. Sekretaris yang membawahi 2 sub bagian yaitu :
 - a. Kepala Subbagian umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
 - b. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
2. Kepala Seksi Pelayanan
3. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara spesifik tugas dan fungsi kecamatan telah diatur dalam Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Sibolga sebagai berikut :

1. Camat

Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.

Camat mempunyai Tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kota yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan kecamatan.

Sekretaris Kecamatan mempunyai Tugas ;

- a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan ketatausahaan;
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran;
- e. Melaksanakan penatausahaan dan penatalaksanaan di bidang kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- f. Melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Subbagian Umum,Kepegawaian dan Perlengkapan

Mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi umum, melaksanakan penatausahaan dan penatalaksanaan kepegawaian, barang milik daerah dan barang milik negara dilingkungan kecamatan

Subbagian umum, kepegawaian dan perlengkapan mempunyai Tugas adalah :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha, tata laksana dan kearsipan;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan urusan dokumentasi dan kepustakaan;
- f. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian dan pelaporan barang milik daerah dan barang milik negara;

- g. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASIN);
- h. Mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(SPIP); dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Subbagian Program dan Keuangan :

Mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan keuangan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan keuangan serta melakukan penatausahaan dan penatalaksanaan keuangan kecamatan.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai Tugas adalah:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan kinerja;
- d. Menyiapkan bahan laporan kinerja dan pelaporan pelaksanaan tugas lainnya;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha keuangan;
- f. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
- g. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- h. Melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas.

5. Kepala Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan dibidang pelayanan yang meliputi pelayanan administrasi publik serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Seksi Pelayanan mempunyai Tugas adalah :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan;
- b. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja ;

- c. Melaksanakan teknis pelayanan administratif di Kecamatan melalui konsep Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertahanan lingkup kerjanya;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil lingkup kerjanya;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi publik lainnya;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan instansi / OPD terkait maupun pihak swasta;
- h. Mengoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- i. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian internal di seksi pelayanan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan yang meliputi pembinaan politik dalam negeri, ideologi negara, ketentraman dan ketertiban diwilayah.

Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban mempunyai Tugas yaitu :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- d. Menghimpun dan menyusun data monografi kecamatan;
- e. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

- f. Menyiapkan bahan pembinaan urusan Pemilihan Umum (PEMILU), pembinaan ideologi negara, kedaulatan bangsa, organisasi sosial politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- g. Menyiapkan dan melakukan koordinasi terkait administrasi Pemilihan Umum (PEMILU);
- h. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan koordinasi terkait penanggulangan bencana;
- j. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum termasuk pembinaan tertib perizinan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- l. Melaksanakan pengendalian internal di seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melakukan pembinaan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, bantuan sosial, kepemudaan, kesetaraan gender dan olah raga di wilayah kecamatan.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas yaitu :

- a. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Mengumpulkan, mengolah, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, bantuan sosial, kepemudaan, kesetaraan gender dan olah raga;
- c. Melaksanakan kegiatan MTQ, STQ dan Pesparawi;
- d. Memantau dan mengoordinasikan kegiatan dibidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, kepemudaan, kesetaraan gender dan olah raga yang dilaksanakan oleh OPD/Instansi terkait maupun pihak swasta;

- e. Memantau dan mengoordinasikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat;
- f. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan;
- g. Memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dan Kelurahan di wilayahnya;
- h. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- j. Menjalankan pengendalian internal di Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- k. Melaksanaka tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan pembinaan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bawah koordinasi kecamatan yang meliputi perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat perekonomian dan lingkungan hidup .

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. Pengumpulan, pengolah, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan datadan informasi bidang pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian dan lingkungan hidup;
- d. Menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/ air minum;

- g. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, peternakan, perikanan, pariwisata dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- i. Menyusun profil kecamatan;
- j. Menyiapkan dan menyelenggarakan perlombaan kelurahan di lingkup kecamatan;
- k. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- l. Mengoordinasikan kegiatan kelompok jabatan fungsional;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- n. Melaksanakan pengendalian internal di Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan, dan kelompok jabatan fungsional ini dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada camat. Sampai saat ini jabatan fungsional yang berada di Kecamatan Sibolga Sambas adalah PLKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan Koordinator Statistik Kecamatan.

2.2 Sumber Daya OPD

1. Aparatur dan Susunan Kepegawaian

Dari sisi administrasi wilayah Tahun 2016, Kecamatan Sibolga Sambas terdiri dari 4 kelurahan yaitu : Kelurahan Pancuran Kerambil, Kelurahan Pancuran Dewa, Kelurahan Pancuran Pinang, dan Kelurahan Pancuran Bambu. Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, OPD Kecamatan Sibolga Sambas didukung oleh Jumlah Pegawai, THL dan PLKB sebanyak 84 orang.

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Sibolga Sambas berdasarkan latar belakang pendidikan, gol./ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

JUMLAH PEGAWAI MENURUT LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
(PER 31 DESEMBER 2016)

No	Status Pegawai	Unit Kerja Kecamatan Sibolga Sambas												
		Camat	Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan	Subbag. Umum Kepeg & Perlengkapan	Subbag. Program & Perencanaan	Lurah	Seksi Pemerintahan	Seksi Trantib	Seksi Pembang. dan Pem.Masy.	Seksi Kesejahteraan Sosial	Seksi Pelayananana	Seksi Pembangunan	Fungsional	Staf
1.	PNS													
	1. Strata-2													
	2. Strata-1		3	1	1	3	2	2		4	1	3	1	6
	3. Diploma-3											1		5
	4.Diploma-1												3	
	5. SLTA/ Sederajat	1	2			1	2	3	1	1			1	11
	6. SLTP/ Sederajat													
	7.SD/ Sederajat													1
2.	Honorarium													
	1. Strata-1													5
	2. SLTA/ Sederajat													19
	Total	1	5	1	1	4	4	5	1	5	1	4	5	47

Sumber : Data Bagian Kepegawaian Kecamatan Sibolga Sambas

**JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN RUANG
(PER 31 DESEMBER 2016)**

No	Status Pegawai	Unit Kerja Kecamatan Sibolga Sambas													
		Golongan	Camat	Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan	Subbag. Umum Kepeg & Perlengkapan	Subbag. Program & Perencanaan	Lurah	Seksi Pemerintahan	Seksi Trantib	Seksi Pembang. dan Pem.Masy.	Seksi Kesejahteraan Sosial	Seksi Pelayanan	Seksi Pembangunan	Fungsional	Staf
1.	Pegawai Negeri Sipil														
	Pembina Tk.I	IVb	1												
	Pembina	IVa													
	Penata Tk.I	IIIId		1					1	1		1		1	
	Penata	IIIc					2	1			1		1		
	Penata Muda Tk.I	IIIb		3	1	1	2	2	3		3		3	3	1
	Penata Muda	IIIa		1				1			1				5
	Pengatur Tk.I	IIId							1						1
	Pengatur	IIc												1	10
	Pengatur Muda TK.I	IIb													3
	Pengatur Muda	IIa													2
	Juru Tk.I	Id													
	Juru	Ic													
	Juru Muda Tk.I	Ib													1
	Juru Muda	Ia													
2.	Honorarium Daerah														24
	Total		1	5	1	1	4	4	5	1	5	1	4	5	47

Sumber : Data Bagian Kepegawaian Kecamatan Sibolga Sambas

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa komposisi pegawai Kecamatan Sibolga Sambas terdiri dari Golongan I 1 orang, Golongan II 18 orang, Golongan III 40 orang dan Golongan IV 1 orang . Adapun jumlah Pejabat Struktural terdiri dari eselon III sebanyak 1 orang dan eselon IV sebanyak 31 orang. Dengan demikian terdapat 60 orang Pegawai Negeri Sipil, 24 orang Tenaga Harian Lepas (Honor) dan Tenaga Kontrak. Dengan didukung juga oleh Kepala Lingkungan di Kelurahan

yang ada di wilayah Kecamatan Sibolga Sambas yang saat ini sudah berjumlah 17 orang.

Sedangkan komposisi pegawai menurut eselon dan diklat penjenjangan/ struktural dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

**PEGAWAI MENURUT ESELON & DIKLAT PENJENJANGAN STRUKTURAL
(PER 31 DESEMBER 2016)**

N o	Status Pegawai	Unit Kerja Kecamatan Sibolga Sambas													
		Golongan	Camat	Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan	Subbag. Umum Kepeg & Perlengkapan	Subbag. Program & Perencanaan	Lurah	Seksi Pemerintahan	Seksi Trantib	Seksi Pembang. dan Pem.Masy.	Seksi Kesejahteraan Sosial	Seksi Pelayananana	Seksi Pembangunan	Fungsional	Staf
1.	Pegawai Neg Sipil														
	Eselon	IIIa	1												
		IIIb		1											
		IVa					4	1	1	1	1	1			
		IVb		4	1	1		4	4		4		4		
	Diklat Pim	Tk.II I		1											
		Tk.I V		1	1		1	2		1		1	2		
Total			1	7	2	1	5	7	5	2	5	2	6	0	0

Sumber : Data Bagian Kepegawaian Kecamatan Sibolga Sambas

2. Infrastruktur Perlengkapan, Sarana dan Prasarana

Kecamatan Sibolga Sambas memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas dengan rincian sebagaimana pada tabel yang meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta aset tetap lainnya (Barang Inventaris).

**KEADAAN BARANG INVENTARIS KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS
PER 31 DESEMBER 2016**

No	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI			KETERANGAN
			LENGKAP	KURANG LENGKAP	MENCUKUPI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Komputer	10 UNIT	V	--	--	Kec. & Kel.
2	Printer	19 UNIT	V	--	--	7 Kec & 10 Kel
3	Mesin Tik	2	V			Kelurahan
4	AC	12	V			6 Kec & 8 Kel
5	Kipas Angin	12	V			1 Kec & 11 Kel
6	Tangga Alumanium	1	V			Kecamatan
7	Lemari 2 Pintu	6	V			4 Kec & 2 Kel
8	Filing Kabinet	4	V			1 Kec & 3Kel
9	Lemari Gantung 3 Meter	1	V			Kelurahan
10	Lemari Gantung 3,5 Meter	1	V			Kelurahan
11	Lemari Gantung 1,5 Meter	1	V			Kecamatan
12	Meja Komputer	3	V			Kec & Kel
13	Meja ½ Biro	20	V			8 Kec & 12Kel
14	Kursi Kerja	20	V			8 Kec & 12 Kel
15	Kursi Plastik	300		V		Kelurahan
16	Sofa	2	V			Kelurahan
17	Dispenser	7	V			3 Kec & 4 Kel
18	Sepeda Motor	5	V			Kec
19	SoundSystem	7	V			2 Kec & 5 Kel
20	Infokus beserta Layar	1	V			Kecamatan
21	Camera Digital	8	V			3 Kec & 5 Kel
22	Televisi	6	V			2 Kec & 4 Kel
23	Gorden	6 Paket	V			2 Kec & 4 Kel
24	Brangkas	2	V			Kecamatan
25	Solinger	5	V			1 Kec & 4 Kel
26	Neon BOX	11	V			3 Kec & 8 Kel
27	Laptop	7	V			3 Kec & 4 Kel
28	Penghancur Kertas	2	V			2 Kec (1RB)
29	Kursi Putar	15	V			14 Kec & 1Kel
30	Teratak	8 Kolom	V			Kelurahan
31	Kipas Angin Pentilasi	3	V			Kecamatan
32	Handy Camera	1	V			Kecamtan
33	Handy Talke	22	V			2 Kec & 20 Kel

34	Ring Mobil	1	V			Kecamatan
35	Pintu Kaca	5	V			1 Kec & 4Kel
36	Hardisk 80 GB	6	V			2 Kec & 4 Kel
37	UPS 1200 V A	5	V			Kecamatan
38	Kursi Rapat	40	V			20 Kec & 60 Kel
39	Running Text	1	V			Kecamatan
40	Bangku Tunggu Tamu	1	V			Kecamatan
41	Pintu Besi	6	V			2 Kec & 4 Kel
42	Rimpel Meja	5 Paket	V			Kec dan Kel
43	Lemari Bank Data Pddk	1 Pkt	V			Kecamatan
44	Meja Rapat	6	V			Kecamatan
45	Meja Penunjang Pel.	1	V			Kecamatan
46	Jerajak Aula	1 PKT	V			Kecamatan
47	Tandon Air	2	V			Kec & Kel
48	Pompa Air	2	V			Kec & Kel
49	Scanner	1	V			Kecamatan

Infrastruktur merupakan pemicu pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana yang tidak memadai pada sebuah sistem maka akan mempengaruhi sub-sub sistem yang ada dalam organisasi. Peningkatan layanan publik yang di kelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, sarana transportasi dan sarana olah raga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur tersebut wewenang yang dimiliki oleh OPD Kecamatan Sibolga Sambas adalah sebagai fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan dengan instansi/OPD terkait lainnya. Salah satu bentuk penyelenggaraan pembangunan baik di bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta bidang lainnya yang sudah menjadi agenda Kecamatan adalah perencanaan pembangunan melalui forum pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan maupun ditingkat kecamatan.

Kondisi Perlengkapan yang ada di Kantor kecamatan Sibolga Sambas secara garis besar tergambar seperti pada tabel 2.4 diatas. Dari data tabel tersebut menunjukkan bahwa kondisi inventaris kantor kelurahan maupun kantor kecamatan sampai dengan tahun 2016 ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode 2011-2015, dimana sejak tahun 2016 secara perlahan namun pasti berbagai fasilitas di Kantor Kelurahan se-Kecamatan Sibolga Sambas dan Kantor Kecamatan Sibolga Sambas telah mengalami peningkatan terutama guna

mendukung efektifitas tupoksi kerja aparaturnya dan peningkatan pelayanan yang prima dan profesional kepada masyarakat di Kecamatan Sibolga Sambas.

Kondisi Bangunan Kantor Kecamatan Sibolga Sambas sampai saat ini sudah beberapa kali mengalami perbaikan/rehab. Khususnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Peningkatan sarana dan prasarana baik di kelurahan maupun Kecamatan Sibolga Sambas dengan maksud untuk meningkatkan tampilan dan fasilitas pelayanan publik dalam pengurusan administrasi pelayanan yang merupakan salah satu prasyarat dalam memberikan pelayanan yang nyaman, aman dan prima kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Sibolga Sambas. Adapun kondisi saat ini sarana dan prasarana Kecamatan Sibolga Sambas, terutama yang mendukung pencapaian sasaran terwujudnya pelayanan yang prima dan profesional kepada masyarakat yaitu:

1. Tampilan depan pintu Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Sibolga Sambas yang tampak lebih elegan dengan tampilan pintu kaca;
2. Ruangan dalam Kantor Camat Sibolga Sambas dengan wallpaper yang berfungsi memperindah tampilan dalam ruangan Kantor Kecamatan Sibolga Sambas;
3. Adanya fasilitas wi-fi dan jaringan internet baik di kelurahan maupun kecamatan;
4. Adanya kursi tunggu bagi masyarakat yang akan dan sedang menunggu proses pelayanan di kecamatan;
5. Adanya Set Meja Pelayanan yang terdiri atas bagian informasi, bagian pemfrosesan berkas, bagian penerimaan berkas serta bagian penyerahan berkas yang tentunya akan lebih memudahkan informasi bagi masyarakat dalam mengurus proses pelayanan berkas administrasinya;
6. Adanya lemari file penyimpanan berkas pelayanan seluruh data pelayanan kelurahan Se-Kecamatan Sibolga Sambas;
7. Adanya AC/Pendingin,TV di ruangan tunggu pelayanan;
8. Adanya Aula Kantor Camat Sibolga Sambas meskipun Kelurahan Pancuran Kerambil kerap menggunakan aula yang sama disebabkan tidak adanya Aula Kantor Lurah Pancuran Kerambil akibat keterbatasan lahan yang ada;
9. Sarana penunjang operasional aktivitas dan kegiatan luar kantor bagi aparaturnya kelurahan dan kecamatan Sibolga Sambas berupa kendaraan

dinas yaitu kendaraan roda 4 (mobil) dan kendaraan roda dua (kereta) sebagian besar kondisinya masih cukup baik, sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa kendaraan dinas yang menunjang operasional kegiatan masih perlu dilakukan perbaikan/pemeliharaan guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ke depan.

3. Potensi Sarana dan Prasarana

1. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan sarana yang sangat penting perannya demi meningkatkan dan memajukan sumber daya manusia (SDM). Semakin lengkapnya fasilitas menurut jenjangnya, maka akan memberikan jaminan bahwa mutu kelulusan dari sekolah dimaksud akan lebih bermutu. Lebih jelasnya jumlah sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Sibolga Sambas dapat dilihat pada table di bawah ini :

No	Sarana Pendidikan	2016
1	TK / PAUD/ BKB	9
2	SD	8
3	SLTP	1
4	SLTA	1
5	Perguruan Tinggi Swasta	1
	Jumlah	20

2. Sarana Ibadah

Sarana Ibadah sangat penting untuk dapat melaksanakan nilai-nilai kepercayaan dan keyakinan umat beragama di suatu wilayah. Hubungan manusia dengan Tuhannya terjalin melalui ibadah yang dilaksanakan oleh manusia itu sendiri sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Di Kecamatan Sibolga Sambas terdapat beberapa rumah ibadah yang dapat dilihat dalam table dibawah ini :

No	Sarana Peribadatan	2016
1	Mesjid	8
2	Gereja	6
3	Mushollah	1
4	Vihara	-
	Jumlah	15

3. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan memiliki peranan yang penting dalam peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Sibolga Sambas dapat dilihat pada table :

No	Sarana Kesehatan	2016
1	Rumah Sakit	-
2	Puskesmas	1
3	Puskesmas Pembantu	2
4	BPU	-
5	BKIA	-
6	POSYANDU BALITA	9
7	POSYANDU LANSIA	10
	Jumlah	22

4. Sarana Olahraga

Sarana Olahraga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesehatan jasmani dalam mengembangkan bakat maupun kemampuan yang dimiliki. Adapun sarana olahraga yang ada di Kecamatan Sibolga Sambas dapat dilihat pada table di bawah ini :

No	Sarana Olahraga	Jumlah (Unit)
1	Lapangan Bulu Tangkis	-
2	Lapangan Volly	1
3	Lapangan Basket	-
4	Lapangan Sepak Takraw	-
5	Lapangan Sepak Bola	-
6	Fitness	-
7	Kolam Renang	-
	Jumlah	1

5. Sarana Pariwisata

Sarana Pariwisata sangat mendukung potensi Kecamatan Sibolga Sambas dalam rangka menerima wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain tersedianya sarana terdapat pula daerah wisata dan panorama alam yang indah seperti Pulau Poncan dan Teluk Tapian Nauli. Adapun jumlah sarana pariwisata Kecamatan Sibolga Sambas yang mempunyai izin usaha dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No	Sarana Wisata	Jumlah (Unit)
1	Rumah Makan dan Kedai Kopi	40
2	Hotel / Losmen / Penginapan	8
3	Bilyar	-
4	Salon dan Pangkas Rambut Pria	16
5	Biro Perjalanan	-
	Jumlah	64

6. Jumlah Perizinan yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2017

JENIS USAHA	JUMLAH
Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	-
Izin Gangguan (HO)	12
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	11
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-
Surat Izin Pemakaian Jalan	9

7. Jumlah Sarana Pendukung Kebersihan di Kecamatan Sibolga Sambas

b.

No	Sarana Olahraga	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Truk Sampah	2	Seluruhnya tersebar di masing-masing Kelurahan se-Kecamatan Sibolga Sambas
2	Gerobak Sampah	3	
3	Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	10	
4	Tong Sampah	100	
5	Petugas Penyapu Jalan	23	
6	Betor	4	
	Jumlah	142	

Sumber : Data Dinas LHKP Kota Sibolga

• Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam tugas pokok dan fungsi kecamatan pelaksanaan kegiatannya membutuhkan dukungan dana agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Anggaran OPD Kecamatan Sibolga Sambas selama kurun waktu 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena kecenderungan penambahan program dan kegiatan serta kenaikan dalam penetapan standarisasi harga dalam pelaksanaan kegiatan. Hanya Pada Tahun

anggaran 2015 alokasi anggaran APBD untuk program dan kegiatan di Kecamatan Sibolga Sambas cenderung menurun dibandingkan dengan anggaran tahun 2014 yang disebabkan oleh:

1. Adanya beberapa kegiatan yang berkurang/tidak ditampung anggarannya lagi di tahun 2015;
2. Adanya beberapa anggaran kegiatan yang sama tetapi di tahun 2015 justru berkurang anggarannya.

Namun anggaran untuk program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat belum optimal, hal tersebut karena tidak semua program dan kegiatan OPD Kecamatan Sibolga Sambas yang dilaksanakan tercover dalam anggaran APBD Kota Sibolga.

Dengan semakin banyaknya Volume kegiatan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih perlu adanya penyesuaian anggaran yang cukup.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Sibolga Sambas

Tugas Pokok dan fungsi OPD Kecamatan Sibolga Sambas sesuai dengan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 61 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Sibolga adalah membantu Walikota Sibolga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan Sibolga Sambas.

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Sibolga Sambas berdasarkan pada pedoman ***pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Kepmenpan No: 009 tahun 2007 , pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran.***

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian

pengukuran indikator kinerja makro untuk berbagai urusan/program tahun 2011-2015 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sibolga Sambas menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya dengan *mengacu pada LKjIP Kecamatan Sibolga Sambas tahun 2011-2015*.

Secara ringkas berdasarkan tugas, pokok dan fungsi kecamatan sesuai dengan visi dan misi selama kurun waktu Periode Renstra 2011-2015 ditetapkanlah Sasaran Strategis Kecamatan Sibolga Sambas sebagai berikut :

1. Terlaksananya pelayanan yang prima dan professional;
2. Meningkatnya pengawasan pemerintah kecamatan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
3. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik demi Peningkatan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat melalui Koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan sasaran strategis seperti tersebut diatas, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk urusan Wajib OPD Kecamatan sibolga Sambas periode 2011-2015 meliputi :

1. Rata-rata waktu penyelesaian pelayanan sampai Tk. Kecamatan;
2. Jumlah monitoring dalam aspek pemerintahan umum, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
3. Angka partisipasi masyarakat dalam aspek pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan.

Untuk urusan rutin pengukuran sasaran kinerjanya berdasarkan indikator keluaran program dan kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2011-2015 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja utama nyata (realisasi) atau dengan target akhir Renstra Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sedangkan Kinerja pelayanan urusan rutin berdasarkan indikator keluaran OPD adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan Jasa Surat menyurat, Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Jasa kebersihan kantor, Alat tulis kantor, Barang cetakan dan penggandaan, Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Jasa Non PNS, Jasa lembur PNS dan Non PNS
2. Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah : Terlaksananya kegiatan pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan mebeleur, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor.
3. Pencapaian kinerja program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah: Terlaksananya kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. Pencapaian kinerja program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan adalah : Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran/prognosis kas, Laporan Tahunan Kas, RENJA, RKA, RKPA, LKjIP, Laporan Tahunan Asset, Laporan Semesteran/Prognosis Asset, Pemusnahan dan Penomoran Barang Inventaris.

Untuk lebih jelasnya rincian dan detail tingkat capaian kinerja OPD Kecamatan Sibolga Sambas. Gambaran kinerja Pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah di lingkup OPD Kecamatan Sibolga Sambas kurun waktu 2011-2015 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Keluaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Sibolga Sambas serta analisis terhadap LKjIP 2015, dapat

dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kecamatan Sibolga Sambas sebagai berikut :

1. Tuntutan implementasi Good Governance yang merupakan peluang bagi Kecamatan Sibolga Sambas untuk meningkatkan kinerja;
2. Waktu penyelesaian pelayanan publik yang semakin cepat serta semakin efektif dan efisiennya jumlah dokumen pelayanan yang diselesaikan mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan merupakan sebuah tantangan bagi aparat kelurahan dan kecamatan di wilayah kecamatan Sibolga Sambas;
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan (perencanaan, maupun pengawasan);
4. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
5. Dukungan dan koordinasi penuh dari instansi/dinas terkait terhadap Kecamatan Sibolga Sambas atas terbitnya Peraturan Walikota Sibolga No: 7 Tahun 2015, Tentang Pelimpahan Sebahagian Wewenang Walikota kepada Camat untuk Menangani Sebahagian Urusan Otonomi Daerah;
6. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya;
7. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
8. Diharapkan kedepan Sumber Daya manusia pegawai di Kecamatan Sibolga Sambas mempunyai kompetensi skill teknis sesuai tupoksi kerja yang ada dengan latar belakang pendidikan yang mampu untuk menganalisis dan memecahkan masalah serta memberikan solusi dan inovasi yang tinggi terutama terhadap kegiatan-kegiatan pelayanan terhadap masyarakat;
9. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan, memiliki dedikasi dan integritas terhadap pekerjaannya, transparan dalam mengelola kegiatan pelayanan, memiliki akuntabilitas kinerja dan disiplin aparat yang tinggi sehingga muara akhirnya adalah akan mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang khususnya

pembangunan pola mitra kepercayaan terhadap masyarakat yang dilayani. Untuk mencapai hal tersebut penting bagi aparat dibekali pengetahuan dengan mengikuti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan emosional yang populer dengan singkatan ESQ. Dapat diproyeksikan bahwa dalam jangka panjang ke depan kantor Kecamatan Sibolga Sambas akan di dukung oleh aparat yang berkompeten dalam bidangnya untuk menjalankan tupoksi kerjanya, memiliki jenjang pendidikan minimal Sarjana atau Diploma 3, memiliki kecakapan dan peka terhadap kebutuhan pelayanan oleh masyarakat dan memiliki mental pribadi yang kuat.

1. Kondisi yang Diinginkan

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- Tertibnya (transparan, prosedural, akuntabel) proses administrasi kepengurusan dokumen-dokumen kependudukan mulai dari KK, KTP, Surat Pindah Masuk dan Keluar, Akte Kelahiran dan Akte Kematian;
- Tertatanya seluruh Dokumen-dokumen pelayanan kependudukan kelurahan pada Lemari Bank Data di Kecamatan Sibolga Sambas;
- Persentase Masyarakat Kecamatan Sibolga Sambas memiliki KK dan KTP Elektronik pada tahun 2021 dapat mencapai 100%.

Bidang Aparatur

a. Sumber Daya Manusia

- Dilaksanakannya diklat perencanaan bagi Kasubbag Perencanaan dan seluruh kasi terkait program/kegiatan yang menjadi bagian tupoksi kerjanya di Kecamatan;
- Dilaksanakannya diklat etika standar yang harus dimiliki oleh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi menunjang proses pelaksanaan PATEN di Kecamatan dan demi menunjang pelayanan prima kepada masyarakat;
- Terpenuhinya kebutuhan Sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional baik di kelurahan dan kecamatan guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat;

- Meningkatnya intensif kesejahteraan bagi aparatur kelurahan dan kecamatan sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

b. Infrastruktur perlengkapan, Sarana dan Prasarana

- Adanya Aula Kantor Lurah Pancuran Kerambil;
- Adanya Sekat meja pelayanan dalam proses pengurusan berkas pelayanan Kelurahan Se-Kecamatan Sibolga Sambas;
- Adanya Lemari Bank Penyimpan dokumen pelayanan Kelurahan Se-Kecamatan Sibolga Sambas.

Bidang Ekonomi

a. Pendapatan Daerah

- Realisasi PBB Kelurahan Se-Kecamatan Sibolga Sambas meningkat;
- Adanya retribusi bagi pelayanan perizinan di Kecamatan yang pengelolaannya sudah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari walikota;
- Meningkatnya intensif pemungutan Satgas PBB Kelurahan Se-Kecamatan Sibolga Sambas;
- Koordinasi yang sinergis antara kelurahan, kecamatan dan Dinas PKAD Kota Sibolga dalam upaya peningkatan PBB oleh masyarakat.

Bidang Sosial Budaya

a. Perencanaan Sosial Budaya

- Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Data Pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable);
- Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder);

- Peningkatan Komitmen multipihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kecamatan dalam perencanaan pembangunan;
- Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/ melibatkan publik;
- Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

b. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Bidang Pendidikan

- Berkembangnya program pendidikan non formal PADU sehingga pemerataan kesempatan mendapatkan pengetahuan dini bagi Balita akan merata Se-Kecamatan Sibolga Sambas;
- Pendidikan dan Pelatihan bagi guru/pengajar pada sekolah PADU;
- Koordinasi program wajib belajar 12 tahun dengan Dinas Pendidikan Kota Sibolga terkait usia anak putus sekolah maupun anak usia sekolah yang kurang mampu untuk mengikuti program Beasiswa.

Bidang Kesehatan

- Meningkatnya pelaksanaan Posyandu dan pemberian makanan tambahan/gizi pada balita sehingga dapat menekan angka rawan gizi/gizi buruk pada balita;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan dengan mengikuti asuransi kesehatan melalui iuran pembayaran mandiri pada BPJS Kota Sibolga.

Bidang Agama

- Meningkatnya Partisipasi masyarakat/lembaga sosial dan keagamaan pada kegiatan sosial/keagamaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sibolga dan Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas.

Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- Berkurangnya angka kemiskinan di Kecamatan Sibolga Sambas dengan menurunnya jumlah masyarakat penerima bantuan RASKIN dan Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- Peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat Kecamatan Sibolga Sambas melalui program dan kegiatan pemberdayaan diberbagai bidang aspek kehidupan;
- Program pemberdayaan PNPM Mandiri yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Sibolga Sambas;
- Koordinasi yang lancar dengan instansi/OPD/UPT terkait kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat di Kecamatan Sibolga Sambas;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk turut berpartisipasi pada program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk bersama menjaga potensi gangguan ketertiban dan ketentraman di lingkungan masing-masing;
- Kerjasama dan koordinasi yang sinergis antara Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas, Muspika Kecamatan (Kapolsek dan Danramil), Pemerintah Kelurahan serta Babinsa/ Babinkamtibnas untuk mencegah potensi-potensi yang mengancam Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Bidang Lingkungan Hidup

- Adanya Tapal Batas yang jelas antar kelurahan dalam kecamatan/antar kecamatan di bagian sisi Barat (Areal Bukit Barisan);
- Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

2. Proyeksi Masa Depan

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- Persiapan Data guna mensukseskan Program Menteri Dalam Negeri yaitu pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) khusus Anak.

Bidang Aparatur

a. Sumber Daya Manusia

- Permasalahan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut Aparatur Sipil Negara yang semakin kompetitif, professional, dan menguasai IT (Informasi Teknologi).

b. Infrastruktur perlengkapan, Sarana dan Prasarana

- Dengan Keterbatasan lahan yang ada, Letak dan posisi Kantor Camat Sibolga Sambas yang berada sekitar 1 meter dibawah Badan Jalan guna pengefektifan diproyeksikan kedepan konsep Kantor Camat Bertingkat dan Basementnya dimanfaatkan sbg Lokasi Parkir kendaraan.

Bidang Ekonomi

a. Pendapatan Daerah

- Meningkatnya jumlah penerimaan PBB Se-Kecamatan Sibolga Sambas.

Bidang Sosial Budaya

a. Perencanaan Sosial Budaya

- Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti;
- Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan dalam kebijakan peningkatan kualitas melalui kegiatan dan program pemberdayaan;
- Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring serta evaluasi pembangunan.

b. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Bidang Pendidikan

- Perkembangan global dan mulai diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) pada Desember tahun 2015 menjadikan pentingnya perencanaan Sumber daya yang berkualitas semenjak dini, karenanya Sistem Pendidikan yang semakin kompetitif harusnya menjadi persyaratan mutlak dan salah satunya adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini (PADU) yang diharapkan untuk terus dapat mengembangkan kurikulum dan sistem pengajarannya mengikuti nilai-nilai budaya bangsa dan perkembangan lokal, nasional dan global pada era yang bersangkutan. Karena itu pentingnya diperkenalkan PAUD/PADU sebagai Pra pendidikan Dini bagi anak sebelum memasuki Jenjang Pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak).

Bidang Kesehatan

- Tumbuhnya alternatif pusat layanan kesehatan disamping Rumah Sakit Umum dan Puskesmas milik pemerintah yang dapat menerima pembayaran melalui BPJS, Kiranya membuat Partisipasi masyarakat terus tumbuh dan meningkat akan pentingnya anggota keluarganya terdaftar dan membayar iuran mandiri sebagai peserta BPJS Kota Sibolga;
- Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat pada Kegiatan Posyandu baik balita maupun lansia.

Bidang Agama

- Berkembang dan menguatnya lembaga-lembaga sosial dan keagamaan yaitu gereja-gereja, Taman Pengajian Al-qurán (TPA), BKM Mesjid Se-Kecamatan Sibolga Sambas.

Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- Program Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh OPD terkait hendaknya berorientasi Mempersiapkan Masyarakat untuk siap bersaing pada percaturan perdagangan global MEA (Masyarakat Ekonomi Asia). Sehingga masyarakat dapat menjadi tuan rumah

di Kotanya sendiri, bukannya tergerus oleh Persaingan masyarakat Asia tersebut;

- Berkembangnya program PNPM Mandiri guna meningkatkan akses sarana dan prasarana maupun kegiatan yang tepat sasaran akan kebutuhan masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- Semakin berkembangnya arus globalisasi, menjadikan daerah semakin rawan atas ancaman terhadap keamanan, ketertiban dan ketentraman umum, karenanya sikap siaga atas ancaman tersebut harus dapat dideteksi dan diantisipasi oleh masyarakat mulai dari lingkungan kelurahannya masing-masing.

Bidang Lingkungan Hidup

- Terpetanya titik-titik lokasi Rawan Bencana Kebakaran dan Banjir di wilayah Kecamatan Sibolga Sambas;
- Adanya Rancangan Peraturan Daerah oleh Dinas terkait tentang ‘DENDA” bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik di lingkungannya masing-masing, di tempat umum seperti jalan, sungai, laut untuk dapat menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya lingkungan dan ekosistem yang sehat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS OPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Kecamatan Sibolga Sambas adalah salah satu kecamatan baru di Kota Sibolga yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2002 tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2002. Kecamatan Sibolga Sambas merupakan pemekaran dari Kecamatan Sibolga Selatan. Adapun kelurahan yang termasuk dalam wilayah kerja Kecamatan Sibolga Sambas yaitu Kelurahan Pancuran Kerambil, Kelurahan Pancuran Dewa, Kelurahan Pancuran Pinang dan Kelurahan Pancuran Bambu. Dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan daerah dimaksud, maka pada tanggal 21 Januari 2003, Kecamatan Sibolga Sambas resmi menjalankan peran sebagai salah satu ujung tombak pemberi pelayanan di Kota Sibolga khususnya di Kecamatan Sibolga Sambas.

Berdasarkan data kependudukan, bahwa jumlah penduduk Kecamatan Sibolga Sambas terlihat pada tabel di bawah ini :

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
KEADAAN DESEMBER 2016**

No	Kelurahan	Penduduk Menurut Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pancuran Kerambil	1.669	1.733	3.402
2.	Pancuran Dewa	2.891	2.783	5.674
3.	Pancuran Bambu	4.295	4.091	8.386
4.	Pancuran Pinang	2.737	2.709	5.446
Jumlah		11.592	11.316	22.908

Sumber : Disduk Capil Kota Sibolga Tahun 2016

Secara kelembagaan, eksistensi Kecamatan Sibolga Sambas mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Kota Sibolga dengan telah diberlakukannya Peraturan Walikota Sibolga Nomor 61 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Sibolga, maka Camat Sibolga Sambas mempunyai tugas pokok membantu

Walikota Sibolga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan Sibolga Sambas. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota dan tugas pemerintahan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan organisasi yang ideal untuk melaksanakan fungsi-fungsi rumah tangga pemerintahan dan fungsi pelayanan publik. Berangkat dari pemikiran tersebut, berikut Kondisi dilihat dari urusan wajib berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sibolga Sambas.

Pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah di lingkup OPD Kecamatan Sibolga Sambas, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan diwujudkan dalam uraian garis besar sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Penyelesaian	Ket
1	2	3	4	5
1.	Administrasi Kependudukan :			
	▪ Rekomendasi Pembuatan KTP	Terbitnya Rekomendasi KTP	1 Hari	Pelayanan sampai pada tingkat Kecamatan, bukan sampai tahap terbitnya dokumen yang penyelesaiannya tergantung oleh dinas atau instansi terkait
	▪ Rekomendasi Pembuatan KK	Terbitnya Rekomendasi KK	1 Hari	
	▪ Rekomendasi Surat Keterangan Pindah	Terbitnya Rekomendasi Surat Keterangan Pindah	1 Hari	
	▪ Surat Keterangan Kematian	Terbitnya Surat Keterangan Kematian	1 Hari	
	▪ Surat Keterangan Ahli Waris	Terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris	1 Hari	
	▪ Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Terbitnya Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	1 Hari	
	▪ Rekomendasi Permohonan Nikah (N1,N2,N3,N4)	Terbitnya Rekomendasi Permohonan Nikah (N1,N2,N3,N4)	1 Hari	
	▪ Rekomendasi Surat Ket. Kurang	Terbitnya Rekomendasi Surat Keterangan Kurang	1 Hari	

	Mampu	Mampu		
2.	Perizinan			
	▪ Rekomendasi IMB	Terbitnya Rekomendasi IMB	1 Hari	
	▪ Rekomendasi SIUP	Terbitnya Rekomendasi SIUP	1 Hari	
	▪ Surat Izin Keramaian	Terselenggaranya Keamanan dan Ketertiban	1 Hari	

A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (ANALISIS SWOT/ STRENGHT, WEAKNESS, OPPORTUNITY, AND THREATH)

1. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

a. Faktor Kekuatan (Strong)

1. Telah ditetapkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebahagian wewenang Walikota kepada Camat untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah;
2. Telah disusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk jenis pelayanan tertentu di Kecamatan;
3. Pemberian reward dan punishment kepada pegawai yang berprestasi dan disiplin;
4. Pola kerja di Kecamatan yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif;
5. Adanya evaluasi terhadap program/kegiatan berdasarkan hasil LKIP/Laporan Tahunan;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan secara bertahap dan berkala di kelurahan maupun kecamatan;
7. Adanya kebijakan nasional dari pemerintah pusat terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat diberbagai aspek bidang kehidupan.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Jumlah aparat baik di kelurahan maupun kecamatan yang masih kurang memadai bagi penerapan shift pelayanan dengan identifikasi tugas pelayanan yang terbagi atas penerima tamu/pemberi informasi, penerima berkas, pemfroses berkas, dan penyerahan berkas pelayanan;

2. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui musrenbang sulit untuk mengatur dan menjalin koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif;
4. Belum adanya data analisis terkait dengan jenis program pemberdayaan yang sesuai bagi masyarakat Kecamatan Sibolga Sambas dengan berbagai kondisi dan keadaan latar belakang pendidikan, budaya dan pola pikir yang ada;
5. Belum adanya rekap basis data terkait dengan jumlah masyarakat yang pernah mengikuti program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah serta evaluasi terhadap masyarakat yang telah mengikuti program tersebut;
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan program-program pemberdayaan diberbagai aspek bidang kehidupan masyarakat;
7. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan kepada masyarakat;
8. Aktifitas masyarakat mencari nafkah acapkali menjadi kendala bagi pemerintah mengajak masyarakat pada pelaksanaan program pemberdayaan yang dicanangkan baik oleh pemerintah pusat, propinsi maupun pemerintah kota;
9. Ketergantungan masyarakat terhadap program pemerintah berbasis pemberian langsung tunai, sehingga program pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan kurang mendapat respon positif dari masyarakat.

2. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas;
2. Penyerapan anggaran yang signifikan bagi peningkatan intensif aparatur petugas pelayanan baik di kelurahan dan kecamatan serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan;

3. Pendidikan dan Pelatihan khusus etika, sikap dan tata krama bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mendukung pelayanan prima dan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan;
4. Komunikasi dan koordinasi yang baik dan lancar dengan instansi/OPD lain terkait dokumen pelayanan perizinan
5. Pelibatan Kepala OPD/Camat dalam mutasi jabatan dan staff di kelurahan maupun kecamatan;
6. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik sarana dan prasarana maupun peningkatan kualitas taraf hidup bagi masyarakat melalui program pemberdayaan yang juga giat dicanangkan oleh pemerintah pusat seperti program PNPM Mandiri, dll;
7. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain/OPD dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holder);
8. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Sibolga sudah tertata dengan baik;
9. Berkembang pesatnya Kota Sibolga sebagai Kota persinggahan dari dan ke pulau-pulau terdekat memberikan kesempatan dan peluang yang luas bagi tumbuh berkembangnya berbagai jenis industri dan perdagangan sehingga memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mandiri berusaha/berdagang dalam skala perdagangan industri rumah tangga/rumahan.

b. Faktor Ancaman (Threath)

1. Tuntunan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan dan hal tersebut harus tetap ditampung dan diperhatikan;
2. Penetapan prioritas pembangunan dikaitkan dengan besarnya jumlah anggaran yang disetujui pada OPD Kecamatan;
3. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif serta maksud dari program dan kebijakan pemerintah melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat;

4. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di kecamatan Sibolga Sambas.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Sibolga 2016 sampai dengan 2021 adalah: **“MEWUJUDKAN SIBOLGA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING “.**

Sedangkan Misi nya adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance)”.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan secara merata dan terjangkau bagi masyarakat”.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
4. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas, handal dan berdaya saing.
5. Pengembangan insfratuktur perkotaan dan fasilitas publik serta penataan kawasan perkotaan.

Guna mendukung Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Sibolga Tahun 2016 sampai dengan 2021, OPD Kecamatan Sibolga Sambas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya menekankan kepada substansi-substansi khususnya Misi Walikota/Wakil Walikota terpilih sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*)”: melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kelurahan Se-Kecamatan Sibolga Sambas, meningkatkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah baik itu fungsi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dengan peningkatan keamanan dan

ketertiban lingkungan guna menjaga stabilitas ekonomi yang ada, koordinasi dengan OPD terkait program pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta monitoring pembangunan, dan kesejahteraan sosial masyarakat;

3. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas, handal dan berdaya saing melalui peningkatan SDM Aparat Kecamatan Sibolga Sambah dan kelurahan khususnya melalui pendidikan dan pelatihan terkait Sikap, etika dan attitude dalam proses pelayanan dan dalam mendukung tupoksi kerjanya.

3.3 Telaahaan Renstra K/L dan Renstra

- **Faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Sibolga Sambah**
 - a. Belum adanya Standar Persyaratan terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam kepengurusan rekomendasi izin yang dilimpahkan kewenangannya kepada Kecamatan sesuai dengan Perwal Sibolga No 7 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebahagian wewenang walikota kepada camat untuk menangani sebahagian urusan otda;
 - b. Jumlah SDM aparat yang sedikit kurang memadai ditambah dengan minimnya penjenjangan penambahan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan terkait tupoksi kerja yang ada;
 - c. Tuntutan dan dorongan kecamatan maupun kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat tidak diikuti dengan tambahan intensif bagi aparat di kelurahan dan di kecamatan;
 - d. Belum adanya gedung aula pertemuan Kelurahan Pancuran Kerambil, sehingga masih bersama memakai gedung aula kantor camat. Kendala yang ada jika ada kegiatan bersamaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kelurahan dan kecamatan;
 - e. Belum adanya lahan parkir yang memadai bagi masyarakat yang datang ke Kantor Kecamatan dan kelurahan Pancuran Kerambil sehingga masih mempergunakan badan jalan/trotoar jalan Utama yang intens dan padat arus lalu lintasnya;
 - f. Masih adanya anggapan kurang pentingnya pelaksanaan Musrenbang dan antipati terhadap proses perencanaan Musrenbang;

- g. Bergesernya penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari bottom up planning ke mekanisme lain yang cenderung ke "jalan pintas" Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan, monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam kebijakan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya di pesisir masih bervariasi sehingga program dan kebijakan pemberdayaan masyarakat penerimaannya kepada masyarakat dan prosesnya harus secara bertahap dan membutuhkan waktu;
- i. Kecenderungan ketidaksamaan persepsi aparatur baik di kecamatan maupun kelurahan tentang beban tugas dan program kerja yang ada.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan letak geografis, Kecamatan Sibolga Sambas terletak pada posisi $98^{\circ} 45' - 98^{\circ} 46' 30''$ $98^{\circ} 48'$ dan $01^{\circ} 43' 30'' - 01^{\circ} 42' LU$ yang membentang disepanjang Teluk Tapian Nauli dan membujur dari barat daya ke tenggara di kaki pegunungan Bukit Barisan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sibolga Kota

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sibolga Selatan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Teluk Tapian Nauli.

Kecamatan Sibolga Sambas berada pada $0 - 50 \text{ m}$ diatas permukaan laut dengan luas wilayahnya 1.566 Km^2 (554.9 Ha) dengan rincian sebagai berikut :

Kelurahan Pancuran Kerambil	: luas wilayah 92.06 Ha
Kelurahan Pancuran Dewa	: luas wilayah 127.80 Ha
Kelurahan Pancuran Bambu	: luas wilayah 227.50 Ha
Kelurahan Pancuran Pinang	: luas wilayah 107.54 Ha

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan OPD Kecamatan Sibolga Sambas seperti yang telah dikemukakan pada point 3.1 terkait identifikasi permasalahan pelayanan OPD berdasarkan metode identifikasi SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Treath) yaitu dengan melihat dan menganalisa berdasarkan Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman terkait Pelayanan dan Tupoksi OPD Kecamatan Sibolga Sambas. Berdasarkan hal tersebut berikut adalah isu-isu strategis terkait Rencana Renstra OPD Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- 1 Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
- 2 Masih adanya anggapan kurang pentingnya pelaksanaan Musrenbang, dan antipati terhadap proses perencanaan dalam musrenbang;
- 3 Bergesernya penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari bottom up planning dari musrenbang ke mekanisme lain yang kurang sesuai aturan (cenderung ke jalan pintas);
- 4 Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan, monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam kebijakan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 5 Kurangnya sumberdaya perencanaan baik hardware, software maupun brainware;
- 6 Peningkatan intensif bagi aparatur kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat;
- 7 Masih lemahnya kemampuan aparatur baik di kelurahan maupun kecamatan terkait tata cara, etika dan performance yang baik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat;
- 8 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan di kantor kelurahan dan Kecamatan sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat;

- 9 Masih lemahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program peningkatan kualitas hidup melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan;
- 10 Ketergantungan masyarakat pada program pemberian bantuan langsung tunai dan bantuan pinjaman sehingga jenis program pemberdayaan melalui peningkatan kualitas diri seperti melalui pendidikan dan pelatihan hanya sekedar;
- 11 Tidak adanya data base dan evaluasi terhadap jenis program pemberdayaan yang telah diikuti dan diberikan kepada masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 tahun sampai dengan 5 tahun, dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu tujuan yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

4.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Ketertakaitan Misi, Tujuan dan Sasaran disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : MEWUJUDKAN SIBOLGA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING	
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance)	
TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan profesionalime aparaturn pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan	1) Terlaksananya pelayanan yang prima dan professional
2. Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana, keamanan ketertiban serta pendidikan dan kesehatan	2) Terlaksananya koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita
3. Meningkatkan kualitas hidup melalui pengolahan sumber daya manusia dan kebijakan pemberdayaan masyarakat	3) Partisipasi keterampilan masyarakat guna peningkatan kualitas diri
	3.1)Partisipasi <i>Self Mobilization (memobilisasi diri sendiri)</i> terlibat pada program, kegiatan dan kebijakan pemerintah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Untuk menentukan strategi yang akan ditempuh guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu dilakukan analisis lingkungan untuk menilai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan.

B. Kebijakan

Arah kebijakan OPD Kecamatan Sibolga Sambas merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Walikota Sibolga, sebagai arah bagi satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Sibolga Sambas dalam merumuskan kebijakan untuk mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain arah kebijakan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi OPD Kecamatan Sibolga Sambas selama 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Sibolga Sambas, dalam operasionalnya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Strategi dan arah kebijakan dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Sibolga Sambas selama 5 tahun kedepan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Sibolga Sambas. Untuk selanjutnya pencapaian Kecamatan Sibolga Sambas akan menunjang tercapainya visi dan misi Kota Sibolga selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program Peningkatan disiplin aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peringatan Hari-hari Besar;
6. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.;
7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

9. Program Perencanaan Pembangunan;
10. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
11. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD;
12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
13. Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
14. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
15. Program Pengelolaan kekayaan budaya;
16. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
17. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa;
18. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.

B. Kegiatan

Dari masing –masing program tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai kegiatan, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 4) Penyediaan alat tulis kantor;
 - 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Penyediaan makanan dan minuman;
 - 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - 10) Penyediaan jasa non PNS;
 - 11) Biaya jasa lembur PNS dan NonPNS;
 - 12) Rapat koordinasi antar SKPD dan daerah bawahan.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari :
 - 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - 3) Pengadaan Peralatan gedung kantor;
 - 4) Pengadaan Mebeleur;
 - 5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

- 6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - 8) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
 - 9) Rehabilitasi ringan gedung kantor.
3. Program Peningkatan disiplin aparatur, antara lain :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
 - 2) Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, antara lain :
- 1) Penyusunan laporan semesteran/ prognosis kas;
 - 2) Penyusunan laporan tahunan kas;
 - 3) Penyusunan rencana kerja (RENJA);
 - 4) Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA);
 - 5) Penyusunan rencana kerja dan perubahan anggaran (RKPA);
 - 6) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP);
 - 7) Penyusunan laporan tahunan asset;
 - 8) Penyusunan laporan tahunan semester /prognosis asset;
 - 9) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
 - 10) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas tahunan;
 - 11) Pemusnahan dan penomoran barang inventaris.
5. Program Peringatan Hari-hari Besar, antara lain :
- 1) Pameran HUT RI.
 - 2) Pameran Pembangunan Sibolga.
6. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, antara lain :
- 1) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, antara lain :
- 1) Penilaian Kepala Lingkungan Terbaik;
 - 2) Peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan kepada masyarakat;
 - 3) Rapat koordinasi bulanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan se kecamatan;
 - 4) Penyusunan data monografi kecamatan dan kelurahan;

- 5) Koordinasi dan fasilitasi program/kegiatan kecamatan;
 - 6) Pengolahan perkembangan data kependudukan;
 - 7) Seleksi kepala lingkungan dan pelantikan kepala lingkungan;
 - 8) Monitoring penyelenggaraan kecamatan;
 - 9) Pembekalan tugas dan fungsi kepala lingkungan;
 - 10) Pembinaan kelurahan terbaik;
 - 11) Pemekaran lingkungan;
 - 12) Penyusunan dan Pembuatan Buku Administrasi Kecamatan dan Kelurahan
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, antara lain :
- 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pendidikan/pelatihan dan kursus keterampilan;
 - 3) Pembinaan manajemen kepegawaian dan manajemen barang daerah se kecamatan sibolga sambas;
 - 4) Pembekalan/peningkatan pengetahuan aparatur kelurahan dan kecamatan di bidang pemberdayaan;
 - 5) Pelaksanaan supervisi dan evaluasi tingkat kota dan persiapan tingkat provinsi sumatera utara.
9. Program Perencanaan Pembangunan, terdiri dari :
- 1) Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
10. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, terdiri dari :
- 1) Pengendalian ketertiban kecamatan.
11. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD, terdiri dari :
- 1) Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu – Padu.
12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, antara lain :
- 1) Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan festival nasyid tingkat Kecamatan;
 - 3) Pembinaan qori dan qoriah tingkat kecamatan.
13. Program Pembinaan dan Pemsyarakatan Olahraga, terdiri dari :
- 1) Pekan Olahraga Daerah;
 - 2) Olahraga pagi bersama masyarakat;
 - 3) Senam sehat bersama masyarakat.

14. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Pelaksanaan PESPERAWI tingkat Kecamatan.
15. Program Pengelolaan kekayaan budaya, terdiri dari :
 - 1) Perlombaan Kreasi Budaya Lokal.
16. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, terdiri dari :
 - 1) Pembekalan aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan dalam bidang administrasi.
17. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan/Desa, antara lain :
 - 1) Lomba kebersihan kelurahan tingkat kecamatan;
 - 2) Penilaian kecamatan tingkat kota sibolga;
 - 3) Penilaian kelurahan terbaik dan kelurahan percontohan kota sibolga;
 - 4) Pelaksanaan gotong royong;
 - 5) Paten (Pelayanan Terpadu);
 - 6) Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan kebersihan lingkungan
 - 7) Monitoring evaluasi dan pelaporan;
18. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat, antara lain :
 - 1) Penilaian Gerakan Sayang Ibu (GSI);

Disini dapat dijelaskan bahwa Program Peringatan Hari-hari Besar yang kegiatannya Peringatan HUT RI diganti Pameran HUT RI dan kegiatan Peringatan Hari Jadi Sibolga diganti dengan Pameran Pembangunan Sibolga, Program Pengelolaan kekayaan budaya yang kegiatannya Perlombaan olahraga tradisional pesisir dan seni budaya daerah diganti dengan Perlombaan Kreasi Budaya Lokal.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sibolga Sambahas bersumber pada dana APBD Kota Sibolga. Untuk lebih jelasnya rincian Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaanya pada OPD Kecamatan Sibolga Sambahas dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 berikut ini :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian asasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2011-2015, Kecamatan Sibolga Sambas telah melaksanakan berbagai kegiatan yang pada hakekatnya adalah berorientasi kepada kepentingan masyarakat melalui pemberdayaan dan peningkatan harkat hidup melalui pemanfaatan sumber daya dan aparatur yang ada.

Mengacu pada tujuan dan sasaran kinerja rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2016-2021 maka disusun indikator kinerja SKPD Kantor Camat Sibolga Sambas yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagaimana pada tabel berikut ini :

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra OPD Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2016–2021 merupakan dokumen perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Sibolga Sambas.

Sebagai dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai acuan penyusunan kegiatan, RENSTRA juga berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan demikian RENSTRA OPD Kecamatan Sibolga Sambas akan bermanfaat bagi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan secara optimal, apabila aparaturnya pemerintah yang ada di kecamatan maupun yang ada di kelurahan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan benar-benar berpedoman kepada dokumen RENSTRA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Renstra ini nantinya juga sebagai pedoman kinerja selama lima tahun dengan mengkomparasikan hasil yang dicapai dengan harapan yang telah dirumuskan dan menyiapkan umpan balik (*feed back*) untuk pengambilan keputusan selanjutnya demi perbaikan dan penyempurnaan dari program dan kegiatan tersebut. Dan apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Sibolga Sambas diluar dari renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.

Tabel 5
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Sibolga yang sejahtera, Maju dan Berdaya Saing				
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance)				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelayanan prima yang profesional dan • Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu • Penyampaian pertanggung jawaban keuangan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan ❖ Meningkatkan mutu/kualitas penyelenggaraan pengelolaan pelayanan umum pada masyarakat luas ❖ Meningkatkan responabilitas, transparansi dan keadilan dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, ramah dan berbudaya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Strategi Peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat ✓ Strategi Peningkatan kualitas penyelenggara pemerintah kecamatan ✓ Strategi Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar instansi di lingkungan kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseminasi program, kegiatan dan kebijakan pemberdayaan baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Sibolga kepada masyarakat • Membuat tampilan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih nyaman secara bertahap di kelurahan yang ada di Kecamatan Sibolga Sambas • Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan kepada masyarakat berdasarkan kuisisioner dan diupayakan secara realtime report • Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan pemerintah • Menyusun dan menata basis data administrasi kependudukan

		❖ Mewujudkan hubungan sinergis antara pemerintah kecamatan dan kelurahan		
2. Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana, keamanan ketertiban serta pendidikan dan kesehatan	Terlaksananya koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	<p>🌈 Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana, keamanan ketertiban serta pendidikan dan kesehatan</p> <p>❖ Terlaksananya koordinasi guna peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan, keamanan ketertiban, sosial kemasyarakatan dan kesehatan masyarakat</p>	✓ Strategi Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana, keamanan ketertiban serta pendidikan dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan beserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rangkaian musrenbang • Mengatur teknis mengenai keterlibatan publik dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan musrenbang disetiap lingkungan dan tahapan • Mengoptimalkan kemandirian dan ketentraman dalam bermasyarakat • Meningkatkan program dalam pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita

3. Meningkatkan kualitas hidup melalui pengolahan sumber daya manusia dan kebijakan pemberdayaan masyarakat	Partisipasi keterampilan masyarakat guna peningkatan kualitas diri	❖ Angka partisipasi masyarakat dalam aspek pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan	✓ Strategi Menindaklanjuti usulan program pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan di berbagai bidang kehidupan secara berkala dan mencari formula mekanisme koordinasi dan komunikasi antar instansi/UPT/UPTD terkait program pemberdayaan tersebut• Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya peningkatan kualitas diri melalui partisipasi pada kebijakan-kebijakan pemberdayaan kepada masyarakat
	Partisipasi <i>Self Mobilization</i> (memobilisasi diri sendiri) terlibat pada program, kegiatan dan kebijakan pemerintah			


Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan kegiatan

Visi : Mewujudkan Sibolga yang sejahtera, Maju dan Berdaya Saing						
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance)						
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/ TUJUAN SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelayanan yang prima dan professional • Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan ❖ Meningkatkan mutu/kualitas penyelenggaraan pengelolaan pelayanan umum pada masyarakat luas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Strategi Peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat ✓ Strategi Peningkatan kualitas penyelenggara pemerintah kecamatan ✓ Strategi Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar instansi di lingkungan kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseminasi program, kegiatan dan kebijakan pemberdayaan baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Sibolga kepada masyarakat • Membuat tampilan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih nyaman secara bertahap di kelurahan yang ada di Kecamatan Sibolga Sambas • Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan kepada 	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa surat menyurat; - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; - Penyediaan jasa kebersihan kantor; - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; - Penyediaan makanan dan minuman; - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; - Penyediaan jasa non PNS

	<ul style="list-style-type: none">• Penyampaian pertanggung jawaban keuangan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none">❖ Meningkatkan responbilitas, transparansi dan keadilan dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, ramah dan berbudaya❖ Mewujudkan hubungan sinergis antara pemerintah kecamatan dan kelurahan		<p>masyarakat berdasarkan kuisisioner dan diupayakan secara realtime report</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan pemerintah• Menyusun dan menata basis data administrasi kependudukan	<p>2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</p>	<ul style="list-style-type: none">- Biaya Jasa Lembur PNS dan Non PNS- Rapat koordinasi antar OPD dan daerah bawahan.- Pengadaan kendaraan dinas/operasional;- Pengadaan perlengkapan gedung kantor;- Pengadaan peralatan gedung kantor;- Pengadaan mebeleur;- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;- Pemeliharaan rutin/nerkala kendaraan dinas/operasional;- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;- Rehabilitasi ringan gedung kantor;
--	--	---	--	--	---	---

					<div>3. Peningkatan disiplin aparaturnya</div> <div>4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</div>	<div><div>- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;</div><div>- Pengadaan pakaian olah raga beserta perlengkapannya;</div></div> <div><div>- Penyusunan laporan semesteran/ prognosis kas;</div><div>- Penyusunan laporan tahunan kas;</div><div>- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);</div><div>- Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA);</div><div>- Penyusunan rencana kerja dan perubahan anggaran (RKPA);</div><div>- Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP);</div><div>- Penyusunan laporan tahunan asset;</div><div>- Penyusunan laporan tahunan semester /prognosis asset;</div><div>- Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)</div><div>- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas tahunan;</div><div>- Pemusnahan dan penomoran barang inventaris;</div></div>
--	--	--	--	--	---	---

					<div>5. Peringatan Hari-hari Besar</div> <div>6. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah</div> <div>7. Penataan Daerah Otonomi Baru</div>	<div><div>- Pameran HUT RI</div><div>- Pameran Pembangunan Sibolga</div></div> <div><div>- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat</div></div> <div><div>- Penilaian kepala lingkungan terbaik</div><div>- Peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan kepada masyarakat</div><div>- Rapat koordinasi bulanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan se kecamatan</div><div>- Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan</div><div>- Koordinasi dan fasilitasi program/kegiatan kecamatan</div><div>- Pengolahan perkembangan data kependudukan</div><div>- Seleksi kepala lingkungan dan pelantikan kepala lingkungan</div><div>- Monitoring penyelenggaraan kecamatan</div></div>
--	--	--	--	--	--	---

					8. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	<ul style="list-style-type: none">- Pembekalan tugas dan fungsi kepala lingkungan- Pembinaan kelurahan terbaik- Pemekaran lingkungan- Penyusunan dan Pembuatan Buku Administrasi Kecamatan dan Kelurahan- Sosialisasi peraturan perundang-undangan- Pendidikan/pelatihan dan kursus keterampilan- Pembinaan manajemen kepegawaian dan manajemen barang daerah se kecamatan sibolga sambas- Pembekalan/peningkatan pengetahuan aparatur kelurahan dan kecamatan di bidang pemberdayaan- Pelaksanaan supervisi dan evaluasi tingkat kota dan persiapan tingkat provinsi Sumatera utara
Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam mewujudkan		 Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam	✓ Strategi Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia guna peningkatan	• Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan	1. Perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none">- Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan

pembangunan sarana dan prasarana, keamanan ketertiban serta pendidikan dan kesehatan	Terlaksananya koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	<p>mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana, keamanan ketertiban serta pendidikan dan kesehatan</p> <p>❖ Terlaksananya koordinasi guna peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan , keamanan ketertiban, sosial kemasyarakatan dan kesehatan masyarakat</p>	kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana, keamanan ketertiban serta pendidikan dan kesehatan	<p>pembangunan beserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rangkaian musrenbang</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengatur teknis mengenai keterlibatan publik dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan musrenbang disetiap lingkungan dan tahapan• Mengoptimalkan kemanan dan ketentraman dalam bermasyarakat• Meningkatkan program dalam pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	<p>2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>3. Pengembangan model operasional BKB-posyandu-Padu</p>	<p>- Pengendalian ketertiban kecamatan</p> <p>- Pengembangan model operasional BKB-posyandu-Padu</p>
Meningkatkan kualitas hidup melalui pengolahan sumber daya manusia dan	Partisipasi keterampilan masyarakat guna peningkatan kualitas diri	❖ Angka partisipasi masyarakat dalam aspek pemerintahan umum dan	✓ Strategi Menindaklanjuti usulan program pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan di berbagai bidang kehidupan secara	1. Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kecamatan- Pelaksanaan Nasyid Tingkat Kecamatan

kebijakan pemberdayaan masyarakat		pemberdayaan masyarakat serta kelurahan	rangka peningkatan kualitas masyarakat	berkala dan mencari formula mekanisme koordinasi dan komunikasi antar instansi/UPT/UPTD terkait program pemberdayaan tersebut <ul style="list-style-type: none">Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya peningkatan kualitas diri melalui partisipasi pada kebijakan-kebijakan pemberdayaan kepada masyarakat	2. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	- Pembinaan Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan
	Partisipasi <i>Self Mobilization (memobilisasi diri sendiri)</i> terlibat pada program, kegiatan dan kebijakan pemerintah	❖ Angka partisipasi masyarakat dalam aspek pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan			3. Pembinaan dan Pemasarakan olah raga	- Pelaksanaan Pesparawi Tingkat Kecamatan
					4. Pengelolaan Kekayaan Budaya	- Pekan Olah Raga Daerah
					5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	- Olah Raga Pagi Bersama Masyarakat
					6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat	- Senam Sehat Bersama Masyarakat
						- Perlombaan Kreasi Budaya Lokal
						- Pembekalan Aparatur Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan dalam Bidang Administrasi
						- Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat Kecamatan

					<div>dalam Membangun Kelurahan/ Desa</div> <div>7. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat</div>	<div><div>- Penilaian Kecamatan Tingkat Kota Sibolga</div><div>- Penilaian Kelurahan Terbaik dan Kelurahan Percontohan Kota Sibolga</div><div>- Pelaksanaan Gotong Royong</div><div>- Paten (Pelayanan Terpadu)</div><div>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kebersihan Lingkungan</div><div>- Monitoring evaluasi dan pelaporan</div></div> <div><div>- Penilaian Gerakan Sayang Ibu (GSI)</div></div>
--	--	--	--	--	---	--

Tabel 7.1
Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kecamatan Sibolga Sambas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan	Terlaksananya pelayanan yang prima dan professional	Rata-rata penyelesaian pelayanan administrasi sampai tingkat kecamatan tepat waktu melalui PATEN	75	80	80	90	95	100
		Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu	Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		Penyampaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	Penyampaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
2.	Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam mewujudkan pembangunan sarana/prasarana, keamanan ketertiban serta pendidikan dan kesehatan	Terlaksananya koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	Terlaksananya koordinasi guna peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan, keamanan ketertiban, sosial kemasyarakatan dan kesehatan masyarakat	75	80	80	90	95	100

3.	Meningkatkan kualitas hidup melalui pengolahan sumber daya manusia dan kebijakan pemberdayaan masyarakat	Partisipasi keterampilan masyarakat guna peningkatan kualitas diri							
		Partisipasi <i>Self Mobilization</i> (<i>memobilisasi diri sendiri</i>) terlibat pada program, kegiatan dan kebijakan pemerintah	Angka partisipasi masyarakat dalam aspek pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan	75	80	80	90	95	100

Tabel 7.2
**Indikator Target Capaian Kecamatan Sibolga Sambas
Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Rata-rata penyelesaian pelayanan administrasi sampai tingkat kecamatan tepat waktu melalui PATEN	Persen		75	80	80	90	95	100	100
2.	Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu	Persen		100	100	100	100	100	100	100
3.	Penyampaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	Persen		100	100	100	100	100	100	100
4.	Terlaksananya koordinasi guna peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan, keamanan ketertiban, sosial kemasyarakatan dan kesehatan masyarakat	Persen		75	80	80	90	95	100	100
5.	Angka partisipasi masyarakat dalam aspek pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan	Persen		75	80	80	90	95	100	100

